Bab XII

Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Pengertian, Perspektif, Model, dan Bias
(Huraerah, 2008. bab 11)

Ada berbagai istilah berkenaan dengan konsep Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM). PPM dikenal dengan istilah Commnunity Organization (Cross and Lappin, 1967), *Commnunity Organization or Community Development* (Gilbert and Specht, 1981). PPM juga merupakan metode pekerjaan sosial dengan masyarakat (Skidmore, 1982; Zastrow, 1982), spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial (Johnson, 1984), Community Social Work (Taylor & Roberts, 1985), Bimbingan Sosial Masyarakat (Soetarso, 1991), Community Work (Twelvetress, 1993), Social Work Macro Practice (Netting, Kettner, McMurtry, 2001), atau Community Development (Ife, 2002).

Pengertian Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Menurut Murray G. Ross, PPM adalah suatu proses ketika suatu masyarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber (dari dalam dan atau dari luar masyarakat), mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya ini, dan dalam pelaksanaan keseluruhannya,

memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat (Soetarso, 1994: 29).

Definisi tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Yang dimaksud istilah "proses" adalah serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan di dalam masyarakat. Berbagai proses dapat ditemukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam kaitan ini, proses dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Kemampuan ini tumbuh dan berkembang secara bertahap sebagai akibat upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalahnya.
   Guna mendukung kelangsungan proses ini, dibutuhkan bantuan tenaga profesional (pekerja sosial, petugas pengembangan masyarakat, dan pembimbing kemasyarakatan). Dalam hal ini, tugas tenaga profesional membantu memulai, memperlancar, dan mengembangkan proses ini. Selain itu, tugas tenaga profesional menjadikan proses ini agar dipahemi, disadari, dan diatur secara berencana oleh masyarakat.
b. Istilah "masyarakat" menunjukkan dua macam pengelompokan orang, yaitu:
   - Keseluruhan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, misalnya: desa, kota, propinsi, negara, atau dunia. Pada umumnya, PPM dilaksanakan di daerah geografis yang sempit, tetapi juga dapat diterapkan untuk daerah-daerah yang lebih luas.
   - Kelompok orang yang memiliki minat-minat atau fungsi yang sama, misalnya di bidang: kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertanian, keagamaan, dll.
c. Proses "menentukan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan", berarti cara yang dilakukan warga masyarakat untuk menentukan dan memusatkan perhatian pada masalah yang mengganggu mereka serta menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Namun, dalam hal ini tidak seluruh warga masyarakat dapat dilibatkan dalam penentuan kebutuhan-kebutuhan dan tujuantujuan. Biasanya, kelompok pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, atau pemimpin yang mewakili kelompoknya masingmasing (tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh adat, dll), berusaha menentukan kebutuhankebutuhan yang dipenuhi dan masalah-masalah yang harus ditanggulangi. Di dalam proses PPM

ini, warga masyarakat harus senantiasa memahami, menyadari, dan mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan masalah-masalah, minat-minat, dan harapan-harapannya.

d. Menyusun atau mengatur kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan berarti, perlunya usaha untuk menentukan prioritas. Di antara berbagai jenis masalah dan tujuan, beberapa di antaranya berhubungan langsung dengan apa yang dirasakan, diyakini, dan ditanggapi oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang perlu dijadikan perhatian utama. Pada tahap ini, petugas profesional (pekerja sosial, petugas pengembangan masyarakat, pembimbing kemasyarakatan) dapat memberikan sumbangannya yang besar (pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap profesionalnya) untuk proses pengungkapan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Petugas profesional memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaiannya tentang keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya. Namun perlu ditegaskan, ia tidak menentukan isi prioritas, sebab hal ini akan ditentukan sendiri oleh warga masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan di sini adalah yang dirasakan warga masyarakat sendiri sebagai suatu kebutuhan dan bukan berdasarkan pada pertimbangan, logika, atau ilmu pengetahuan. Apa yang dirasakan warga masyarakat merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam kegiatan kemasyarakatan.
e. Penemuan sumber-sumber (dari dalam dan atau dari luar masyarakat), mencakup upaya menemukan peralatan-peralatan, orang-orang, teknik-teknik, bahan-bahan, dan sebagainya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan.
f. Mengambil tindakan-tindakan yaitu melakukan rangkaian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Proses ini harus mengarah pada tercapainya suatu hasil, meski hanya sebagian saja dari keseluruhan hasil yang diinginkan.
g. Memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat. Ini berarti:
    - Pada saat proses berlangsung dan mengalami kemajuan, warga masyarakat akan mulai memahami, menerima, dan saling bekerja sama.
    - Pada saat berlangsungnya proses penentuan dan penanggulangan masalah bersama, kelompok-kelompok bersama para pemimpinnya akan berusaha saling bekerjasama dalam kegiatan bersama, dan akan mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam penanggulangan

kesulitan-kesulitan dan konflik-konflik yang dihadapi masyarakat tersebut.

Sementara itu, menurut Edi Suharto (1996), PPM merupakan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial *(social well-being)* masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, PPM melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor, serta instansi terkait yang saling bekerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut.

PPM sangat memperhatikan keterpaduan antara sistem klien dengan lingkungannya. Sistem klien bisa bervariasi, mulai dari individu, keluarga, dapat berupa keluarga, Rukun Tetangga, tempat kerja, rumah sakit, dll. Dalam PPM, pekerja sosial menempatkan masyarakat sebagai sistem klien dan sistem lingkungan sekaligus. Karenanya, pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh pekerja sosial yang akan terlibat dalam PPM meliputi pengetahuan tentang masyarakat, organisasi sosial, perkembangan, dan perilaku manusia, dinamika kelompok, program sosial, pemasaran sosial *(social marketing).* Keterampilan analisis sosial, analisis isu, studi sosial, pengumpulan, dan pengorganisasian dana, pengem-bangan dan evaluasi program, serta asesmen kebutuhan *(needs assesment),* (Johnson, 1984, Suharto, 1995).

Perspektif Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM)

Secara teoritis, PPM bisa dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, PPM semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005: 40).

Twelvetress membagi perspektifteoritis PPM ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam

kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural noe-Marxis, feminisme, dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Payne, *"This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe depriuation".* Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai yang bermatra tradisional, netral, dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformasional (Suharto, 2005: 40-41).

Tabel
Dua Perspektif Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Pendekatan	Perspektif	Tujuan/A$umsi
Profesional (Tradisional, Netral, Teknikal)	- Perawatan masyarakat. - Pengorganisasian masyarakat. - Pembangunan masyarakat.	- Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat. - Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada.
Radikal (Transformasional)	- Aksi masyarakat berdasarkan kelas. - Aksi masyarakat berdasarkan gender. - Aksi masyarakat berdasarkan ras.	- Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat. - Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi. - Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif, dan eksploitatif.

Sumber. Dikembangkan dan Mayo dalam Suhano (2005: 4l).

Seperti digambarkan tabel di atas, dua pendekatan tersebut bisa dipecah lagi ke dalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam

jenis dan tingkat praktik PPM yang meliputi: perawatan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, dan pembangunan masyarakat pada gugus profesional, dan aksi masyarakat berdasarkan kelas sosial, aksi masyarakat berdasarkan jender dan aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) pada gugus radikal.

a. Perawatan masyarakat merupakan kegiatan *volunteer* yang biasanya dilakukan warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.
b. Pengorganisasian masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
c. Pembangunan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
d. Aksi masyarakat berdasarkan kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.
e. Aksi masyarakat berdasarkan jender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis-patriarkal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anakanak.
f. Aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial (Suharto, 2005: 41-42).

Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM)

Jack Rothman (1995: 27-34), dalam sebuah tulisannya yang berjudul *“Approaches to Community Intervention”,* mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsep tentang PPM: (1) Pengembangan Masyarakat Lokal *(Locality Development),* (2) Perencanaan Sosial *(Social Planning),* (3) Aksi Sosial *(Social Action).* Paradigma ini merupakan "format ideal" yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Setiap komponennya bisa digunakan secara kombinasi dan simultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

a. **Model Pengembangan Masyarakat Lokal (PML)**.

   Model PML memberikan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktif yang

luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan perubahan. PML adalah proses yang dirancang untuk mendapatkan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri. Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usaha penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat (Suharto, 1996).

Tema-tema pokok dalam model PML mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerjasama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan, pengembangan, kepemimpinan setempat, dan tujuan yang bersifat pendidikan. Misalnya, program ketetanggaan di lingkungan pemukiman, program pendidikan orang dewasa dan aktivitas yang berkaitan dengan dinamika kelompok secara profesional. Dalam model PML, anggota masyarakat di pandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. PML pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (Suharto, 1996).

PML lebih berorientasi pada 'tujuan proses' *(process goal)* daripada tujuan tugas atau tujuan hasil *(task or product goal).* Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi, dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses PML ini. (Suharto, 1996).

b. **Model Perencanaan Sosial (PS)**

Model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif, seperti: kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi dan busung lapar), kesehatan mental, permukiman kumuh, penyalahgunaan narkotika, pelacuran, dan masalah sosial lainnya.

Selain itu, model PS ini mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional, dan dalam pelaksanannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahanperubahan yang terjadi.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah mengumpulkan atau mengungkapkan fakta dan data mengenai sesuatu permasalahan. Kemudian, mengambil tindakan yang rasional dan mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan. Implementasi model PS ini bisa berupa program-program yang berhubungan dengan permasalahan sosial tertentu seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan, teknik yang digunak.an adalah mengerahkan keadilan (tenaga ahli) dalam perencanaan pengumpulan data serta analisis data dalam menyusun gagasan, atau program dan menciptakan kesepakatan (konsensus) atau persetujuan.

Berbeda dengan PML, PS lebih berorientasi pada "tujuan tugas". Sistem klien PML umumnya kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups) atau kelompok rawan soaialekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, janda, yatim piatu, wanita/ pria tuna susila. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai "konsumen" atau "penerima pelayanan". Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses prioritas, karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga formal, semisal lembaga kesejahteraan sosial (Depsos), peradilan (Depkeh), pembangunan desa (Bangdes), kesehatan (Depkes), atau kependudukan ((BKKBN). Para perencana sosial dipandang sebagai 'ahli' (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat serta dalam mengidentifikasi, melaksanak.an, dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan (Suharto, 1996).

c. **Model Aksi Sosial (AS)**

Model AS ini menekankan betapa pentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah, dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung. Juga, meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber a tau perlak.uan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi.

Ada pun langkah yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu adalah menggerakkan golongangolongan masyarakat tertentu guna terlibat aktif dalam mengadakan perubahan-perubahan. Mereka dimotivasi untuk bersikap kritis dan akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti melalui perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerintah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangka menanggulangi masalah yang mereka hadapi sendiri. Dalam kaitan ini, Suharto (1996). menjelaskan, tujuan dan sasaran utama AS adalah perubahanperubahan fundamental dalam kelembagaan pada struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan *(distribution of resources),* dan pengambilan keputusan *(distribution of decision making).* Masyarakat sebagai sistem klien dipandang sebagai "korban" ketidakadilan struktur. Mereka mi skin karena dimiskinkan, lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. AS berorientasi pada "tujuan proses" dan "tujuan hasil". Masyarakat diorganisasi melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokratis, kemerataan *(equality)*, dan keadilan *(equity).*

Tabel
Tiga Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

PARAMETER	PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL	PERENCANAAN SOSIAL	AKSI SOSIAL
Orientasi tujuan	Kemandirian, integrasi dan kemampuan masyarakat (tujuan proses)	Pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat (tujuan tugas/hasil)	Perubahan struktur kekuasaan, lembaga dan sumber (tujuan proses dan tugas)
Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah	Keseimbangan, kurang kemampuan dalam relasi dan pemecahan masalah	Masalah sosial nyata : kemiskinan, pengangguran, kenalan remaja	Ketidakadilan, kesengsaraan, ketidakmerataan, ketidaksetaraan
Asumsi mengenai kepentingan masyarakat	Kepentingan umum atau perbedaan-perbedaan yang diselaraskan	Kepentingan yang dapat diselaraskan atau konflik kepentingan	Konflik kepentingan yang tidak dapat diselaraskan : ketiadaan sumber
Konsepsi mengenai kepentingan umum	*Rationalist-unitary*	*Idealist-unitary*	*Realist-individualist*
Orientasi terhadap struktur kekuasaan	Struktur kekuasaan sebagai kolaborator, perwakilan	Struktur kekuasaan sebagai pekerja dan sponsor	Struktur kekuasaan sebagai sasaran aksi, dominasi elit kekuasaan harus dihilangkan
Sistem klien atau sistem perubahan	Masyarakat secara keseluruhan	Seluruh atau sekelompok masyarakat, termasuk masyarakat fungsional	Sebagian atau sekelompok anggota masyarakat tertentu
Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan	Warga masyarakat atau negara	Konsumen	Korban
Peranan masyarakat	Partisipan dalam proses pemecahan masalah	Konsumen atau penerima pelayanan	Pelaku, elemen, anggota
Peranan pekerja sosial	Pemungkin, koordinator, pembimbing	Peneliti, analisis, fasilitator, pelaksanaan program	Aktivis advokasi : *agitator, broker, negotiator*
Media perubahan	Mobilisasi kelompok-kelompok kecil	Mobilisasi organisasi formal	Mobilisasi organisasi masa dan politik
Strategi perubahan	Pelibatan masyarakat dalam pemecahan masalah	Penentuan masalah dan keputusan melalui tindakan rasional para ahli	Katalisasi dan pengorganisasian masyarakat untuk mengubah struktur kekuasaan
Teknik perubahan	Konsensus dan diskusi kelompok, partisipasi, *brain storming, role playing*, bimbingan dan penyuluhan	Advokasi, *andragogy*, perumusan kebijakan, perencanaan program	Konflik atau unjuk rasa, konfrontasi atau tindakan langsung, mobilisasi massa, analisis kekuasaan, mediasi, agitasi, negosiasi, pembelaan

Sumber: diadaptasi dan diedit dari Rothman, Ercich, dan Tropman oleh Suharto (2005:43)

Bias Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Pelaksanaan PPM sebaiknya didasari oleh masalah dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik geografi, idiografi, potensi, teknologi dan sumber daya lokal serta pelibatan aktif masyarakat secara integral. Namun, dalam realitasnya PPM seringkali terjebak oleh bias, miskonsepsi, atau kesalahan pemikiran *(intellectual fallacy).* PPM perlu menghindari bias ini. Robert Chambers sebagaimana dikutip oleh Suharto (1996: 4) mengemukakan lima bias yang sering terjadi dalam pelaksanaan PPM, terutama di pedesaan: spatial bias, project bias, person bias, dry season bias, dan professional bias. Kemudian Suharto menambahkan tiga bias lagi: physical bias, financial bias, dan indicator bias.

a. **Spatial Bias.** PPM seringkali hanya dilaksanakan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi, seperti di daerah pinggiran kota, pinggir jalan raya, atau lokasi-lokasi yang dekat dengan kantor pemerintahan. Padahal kebanyakan masyarakat (miskin) yang perlu dibangun tinggal di daerah-daerah terpencil.
b. **Project Bias.** Kebanyakan PPM dilakukan pada masyarakat yang telah menerima proyek sebelumnya, karena dipandang telah mampu dan berhasil menjalankan proyek. Masyarakat ini dipandang sebagai masyarakat 'percontohan' yang senantiasa diusulkan sebagai kelompok sasaran (target group) setiap kali proyek dilaksanakan.
c. **Person Bias.** Kelompok elite dalam masyarakat, tokoh masyarakat, kaum lelaki, para penerima dan pengguna inovasi (inovator) serta orang-orang yang aktif dalam kegiatan pembangunan adalah mereka yang kerap menerima program dan berkah pembangunan. Sementara kelompok masyarakat kelas bawah yang kurang memiliki akses terhadap jaringan sumber-sumber (resources network) yang ada, kerap terpinggir atau bahkan dipinggirkan oleh PPM.
d. **Dry Season Bias.** Kesulitan dan masalah yang dihadapi masyarakat umumnya mencapai puncaknva pada saat musim hujan. Kegagalan panen, banjir, kelaparan, masalah kesehatan diri, dan terjadi pada musim sulit. Sementara sebagian besar PPM dilaksanakan pada saat musim panas, musim di mana masalah masyarakat tidak mencapai titik kritis. Bias ini juga dipengaruhi oleh motivasi para *"development tourism"* yang menginginkan kemudahan dalam mengunjungi proyek dengan mobil mewah yang tidak boleh kena lumpur.

e. **Professional Bias.** Bias ini timbul terutama oleh konsepsi yang memandang bahwa kelompok masyarakat yang kurang beruntung sebagai kelompok lemah, memiliki pengetahuan rendah, pasif, malas, fatalis, tidak memiliki jiwa wirausaha, serta ciri-ciri lain dalam budaya kemiskinan (culture of poverty). Sementara itu, para ahli (teknokrat), para penguasa (birokrat) dan para pengusaha (konglomerat) adalah raj a yang memegang hegemoni dan kendali pembangunan. Karenanya, PPM hanya dirumuskan oleh mereka tanpa memper-hatikan kebutuhan, aspirasi, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah TOT (Transfer of Technology), bukan CFCL (Community First and Community Last).
f. **Physical Bias.** Umumnva, masyarakat (bahkan para profesional) hanya mengenal dan mengakui program a tau proyek yang bersifat fisik, seperti pembangunan gedung, jembatan, dll. Tidak mengherankan apabila proyek fisik menempati prioritas dalarn berbagai kegiatan pembangunan. Proyek fisik seringkali dipandang sebagai proses, tujuan, dan hasil sekaligus. keberhasilan proyek hanya dilihat dari beberapa sarana fisik didirikan.
g. **Financial Bias**. Besarnva biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh suatu departemen misalnya, kerapkali dipandang sebagai "bukti keberhasilan program". Financial bias ini disebabkan oleh kesalahan pemikiran yang membaurkan prinsip efisiensi uis a uis prinsip efektivitas sebagai tolok ukur keberhasilan proyek. h. Indicator Bias. Bias ini terutama berkaitan dengan aspek unaccountability pada program yang berorientasi sosial. Dampak keberhasilan program sulit diukur secara langsung dan kuantitatif, serta banyaknya eksternal variabel yang terkontaminasi ke dalam mainstream proyek. Dengan demikian, ada atau tidak adanya dampak program bukan karena ada atau tidak adanya dampak program secara real, tetapi karena kekurang- sempurnaan indikator yang dirumuskan (Suharto, 1996: 4-5).

Mencermati beberapa bias PPM tersebut, semestinya semakin disadari akan pentingnya prinsip keadilan dan pemerataan. Pembangunan hendaknya bisa dilakukan secara adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum banyak tersentuh proyek pembangunan, atau kelompok masyarakat yang tidak beruntung (disaduanted group) lainnya. Dal am kaitan ini, Mubiyarto (1993) mengatakan, tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berarti bahwa kemakmuran rata-rata yang telah meningkat harus

terbagi secara adil. Kemakmuran rata-rata yang meningkat harus menjadi kemakmuran yang merata artinya terbagi secara adil untuk semua lapisan masyarakat di segala pelosok tanah air.

Atas dasar itulah, para pengambil kebijakan, para perencana, dan para pelaksana pembangunan sejatinya memiliki idealisme dan komitmen yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang (bias), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan. Kita tidak boleh membiarkan mereka menjadi kelompok termajinalkan, tertinggal, atau tercecer dalam proses pembangunan.

Daftar Pustaka

Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora.